

**ANALISIS PROSES AKUNTABILITAS PENGGUNAAN DANA
BANTUAN PEMERINTAH KEPADA PARTAI POLITIK TAHUN 2018
(STUDI KASUS PADA DPW PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
JAWA TIMUR)**

Risa Dwi Koirul Ashar

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penggunaan dana bantuan politik yang diberikan oleh pemerintah kepada partai politik menyikapi adanya polemik mengenai kenaikan dana bantuan partai politik hampir sepuluh kali lipat yang diberikan pada tahun anggaran 2018. Dalam penelitian ini mengambil subjek penelitian DPW Partai Persatuan Pembangunan Jawa Timur yang berhak menerima bantuan keuangan partai politik dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi yang dilakukan untuk mendapatkan keterangan terkait proses pengajuan, penggunaan hingga pertanggungjawaban atas dana bantuan keuangan yang diterima partai politik di Provinsi Jawa Timur secara umum dan DPW Partai Persatuan Pembangunan Jawa Timur secara khusus. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa dalam pencatatan laporan keuangannya partai politik tidak jelas mengacu pada PSAK 45 atau SAP, karena dari UU dan peraturan yang mengatur mengenai parpol tidak mengatur secara jelas mengenai bentuk laporan keuangan yang dimaksud; Terdapat toleransi keterlambatan dalam pengumpulan laporan pertanggungjawaban yang melebihi tenggat waktu yang diberikan; Partai politik telah menggunakan dana bantuan keuangan yang diterimanya sesuai dengan peraturan dan telah melalui pemeriksaan BPK sehingga penggunaan dana bantuan yang diterima partai politik dapat dipertanggungjawabkan; Dana bantuan partai politik yang diberikan pemerintah dapat menunjang keperluan operasional partai politik sehingga dapat meningkatkan profesionalitas partai politik penerima dana bantuan keuangan tersebut.

Kata kunci: Akuntabilitas, Bantuan keuangan pemerintah, Partai politik

**ANALYSIS OF THE ACCOUNTABILITY PROCESS OF THE USE OF
GOVERNMENT ASSISTED FUNDS TO POLITICAL PARTIES IN 2018
(CASE STUDY OF DPW PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN OF
EAST JAVA)**

Risa Dwi Koirul Ashar

ABSTRACT

This study aims to determine how the process of using political financial assistance provided by the government to political parties in response to the polemic regarding the almost ten-fold increase in political party financial assistance given on 2018. The subject of this research was the DPW of Partai Persatuan Pembangunan which was authorized to receive political party financial assistance from the government of East Java Province. This study used qualitative method with data collection through interview and documentation studies conducted to obtain information related to the submission process, use and accountability for financial assistance funds received by East Java political parties in general and the DPW of Partai Persatuan Pembangunan of East Java in particular. Based on the result of this study, it was found that in recording their financial statements, political parties did not clearly refer to PSAK 45 or SAP, as the laws and regulations governing political parties did not clearly regulate the form of financial statements in question, there was tolerance for adjournments in submitting accountability reports that exceed the given deadlines, political parties have been used the financial assistance they received in accordance with the regulations and have gone through BPK audits so that the use of aid funds received by political parties can be accounted for, political aid funds provided by the government can support the operational needs of political parties hence increase the professionalism of the political parties receiving these financial assistance funds.

Keywords: Accountability, Government Financial Assistance, Political Parties